

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SD
NEGRI 16 URAT TIMUR**

Erwin Lumban Gaol

Dr. Sari Atmini, SE., M.Si., Ak.

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya

Malang

E-mail: gaollumban221@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pada pengelolaan dana BOS SDN 16 Urat Timur. Subjek penelitian adalah SDN 16 Urat Timur. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dari wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah sebagai ketua tim pengelola dana BOS tingkat sekolah, bendahara, pihak komite sekolah dan pihak guru. Metode pengumpulan data lain yang digunakan adalah metode dokumentasi dan observasi. Peneliti menggunakan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP sebagai instrument evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal sudah diterapkan dengan baik, tetapi masih perlu ada perbaikan di kegiatan pengelolaan dana. Pada kegiatan pengelolaan dana, sekolah perlu untuk membuat prioritas untuk alokasi penggunaan dana BOS dan juga perlu untuk memaksimalkan penggunaan dana BOS sekolah.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Dana BOS, Instansi Pendidikan, Juknis dana BOS

ABSTRACT

***AN EVALUATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE
MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIOANAL ASSISTANCE (BOS)
FUND OF PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL 16 URAT TIMUR***

By:

Erwin Lumban Gaol

Supervisor: Dr. Sari Atmini, SE., M.Si., Ak.

This study aims to evaluate the internal control system in the management of school operational assistance (BOS) fund of Public Elementary School 16 Urat Timur. The subject of the study is SDN 16 Urat Timur. This study applies a qualitative descriptive method where the data are collected through interviews with the school principal as the BOS fund management team leading, and with the school committee and the teachers. The data are also gathered from documentation and observation. The researcher uses PP. No.60 of 2008 concerning government internal control system as an evaluation instrument. The results of the study reveal that the internal control has been implemented properly, yet requires improvement on their fund management activities where the school requires to set BOS fund priority allocation and maximize its utilization.

Keywords: *Government Internal Control System, BOS Fund, Educational Institutions, Technical guidelines for School Operational Assistance Funds*

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Internal pada organisasi dibutuhkan untuk melindungi aset dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Pada institusi pemerintahan dikenal adanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, pengertian sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam lingkungan pemerintahan, SPIP dapat digunakan dalam setiap instansi baik dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Dalam penelitian ini, instansi yang akan diambil sebagai subjek penelitian adalah instansi pendidikan berupa sekolah dengan objek penelitian adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah adalah salah satu sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter baik dan intelektual. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki standar minimal sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi. Yang termasuk dalam sekolah diatur dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2020 Pasal 1. Dalam permendikbud ini,

yang termasuk sekolah adalah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Untuk mendukung sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pendidikan, pemerintah mengeluarkan sebuah program yang dinamakan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang mana tentang pelaksanaan program ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 8 Tahun 2020 yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan program dana BOS. Permendikbud ini merupakan pemenuhan kewajiban pemerintah atas UUD Pasal 31 yang mewajibkan negara untuk menganggarkan APBN minimal 20% untuk sektor pendidikan, dan mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan bagi warga negara yang mengikuti pendidikan dasar.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, pengertian dari dana BOS adalah: “Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.” Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasi melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK-Nonfisik) yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan langsung dari APBN kepada sekolah dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang diatur pada tingkat pemerintah daerah, yang mana kegiatan tersebut sesuai dengan prioritas nasional. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung ditujukan ke rekening sekolah diatur sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non fisik.

Dalam Pengelolaan dana BOS, Kementerian Pendidikan menyusun Petunjuk Teknis yang diatur dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Menurut petunjuk teknis (juknis) tersebut, sekolah harus menyusun tim dana BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, satu orang bendahara, satu orang dari unsur guru, satu orang dari unsur komite sekolah dan satu orang dari orang tua murid yang tidak termasuk komite sekolah. Tim dana BOS inilah yang akan mengelola dana BOS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Meskipun SPIP yang disusun oleh pemerintah sudah baik, masih seringkali ditemukan adanya penyelewengan dana BOS, dan tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan pengelolaan dana BOS. Seringkali ditemukan kasus penyelewengan dana BOS dari berbagai tingkat. Sebagai contoh adalah kasus pada SMKN 2 Kisaran yang mana kepala sekolah melakukan tindakan penggelapan dana BOS hingga Rp900.000.000,00. Bahkan, meskipun dana BOS langsung ditransfer kepada sekolah, masih banyak kasus ditemui bahwa

Pemerintah Daerah masih dapat campur tangan dalam penyelewengan dana BOS dengan memanfaatkan Kepala Sekolah. Untuk mencegah terjadinya berbagai macam tindakan penyelewengan dana BOS ini, bukan hanya pada bagaimana sistem pengendalian sudah ada, tetapi apakah sekolah sudah melaksanakan sistem pengendalian internalnya dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dari SD Negeri 16 Urat Timur yang bertujuan untuk menilai apakah penerapan SPIP yang disusun pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik dan apakah SPIP yang dilaksanakan sudah sesuai untuk kondisi yang dibutuhkan oleh sekolah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara detail bagaimana sekolah dalam melaksanakan pengendalian internal dan apakah ada unsur pengendalian yang memiliki kelemahan. Temuan penelitian ini ke depannya diharapkan dapat untuk mencegah penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pada penelitian ini, sekolah yang dipilih peneliti sebagai subjek penelitian adalah SD Negeri 16 Urat Timur. Dalam menentukan subjek penelitian ini, peneliti pernah bersekolah di SD Negeri 16 Urat Timur dan lokasi rumah yang dekat dengan subjek penelitian, sehingga peneliti lebih mengetahui tentang subjek penelitian. Faktor lain yang mempengaruhi pemilihan SD tersebut adalah bahwa SD tersebut merupakan sekolah yang menaungi beberapa desa di Kabupaten Samosir. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah SD Negeri 16 Urat Timur sudah

memiliki sarana-prasarana yang lengkap seperti perpustakaan, alar praktek, wifi, komputer, dan lapangan dan sehingga peneliti dapat secara langsung melihat dan memahami tentang dana BOS di sekolah dan dapat mendapatkan gambaran umum mengenai bagaimana SPIP dan pengelolaan dana BOS sekolah. Dengan demikian, peneliti berharap untuk mendapatkan data yang lebih dalam terkait objek penelitian.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Apakah sistem pengendalian terhadap Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diimplementasikan oleh SD Negeri 16 Urat Timur sudah sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008?; (2) Kelemahan apa saja yang dapat ditemukan dalam system pengendalian internal dan pengelolaan dana BOS SD Negeri 16 Urat Timur?; (3) Rekomendasi apa yang dapat diberikan atas system pengendalian internal dan kegiatan pengelolaan dana BOS SD Negeri 16 Urat Timur?

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Sedangkan Menurut Mardi (2011:59) pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah.

Berdasarkan beberapa definisi SPI tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa SPIP adalah proses yang disusun dalam suatu entitas yang dilakukan secara terstruktur oleh semua personel organisasi dengan tujuan efisiensi dan efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset entitas, ketaatan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikat organisasi.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016:129), pengendalian internal memiliki beberapa tujuan yang dapat dijadikan patokan untuk pengelolaan sistem tersebut, yaitu: (1) Menjaga kekayaan organisasi; (2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi; (3) Mendorong efisiensi; (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal pada Pasal 2 ayat 3 menjelaskan tentang tujuan pengendalian internal yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan tentang unsur-unsur pengendalian internal. Ada lima unsur pengendalian internal, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian internal ini adalah kerangka kerja yang harus diaplikasikan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2019, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Dana BOS ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan langsung dari APBN kepada sekolah dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang diatur pada tingkat pemerintah daerah, yang mana kegiatan tersebut sesuai dengan prioritas nasional. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung ditujukan ke rekening sekolah diatur sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.07/2020 Tentang

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Tujuan dari dana BOS diatur dalam Permendikbud No.8 Tahun 2020, yaitu: (1) Membantu biaya operasional sekolah; (2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

METODE PENELITIAN.

Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Situs Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 16 Urat Timur. SDN ini adalah sekolah yang terletak di Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara.

Teknik Pengumpulan Data.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Yin (2013:133-150) yang membagi tiga teknik analisis untuk studi kasus, yaitu: (1) penjadohan pola, yaitu dengan menggunakan logika penjadohan pola. Logika seperti ini membandingkan pola yang didasarkan atas data empirik dengan pola yang diprediksikan. Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan; (2) pembuatan eksplanasi, yang bertujuan untuk menganalisis data

studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan dan (3) analisis deret waktu, yang banyak dipergunakan untuk studi kasus yang menggunakan pendekatan eksperimen dan kuasi eksperimen.

Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, pengecekan keabsahan data digunakan dengan metode triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Pada triangulasi sumber, data diuji kembali dengan sumber data yang berbeda. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dari kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, guru dan orang tua siswa. Teknik triangulasi lain yang digunakan adalah triangulasi metode. Pada teknik triangulasi metode, peneliti menggunakan beberapa metode berbeda untuk pengumpulan data karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam pengaplikasiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Lingkungan pengendalian.

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Pertama aturan perilaku sudah ada tersusun dalam juknis dana BOS seperti pelaksanaan rapat yang dilaksanakan setiap triwulan, yaitu setiap bulan Januari, April, Juli, Oktober untuk membahas alokasi penggunaan dana BOS. Kedua,

kepala sekolah sudah memberikan keteladanan yang baik kepada anggota seperti sudah menyebarkan surat undangan rapat kepada anggota, membuat agenda rapat yang jelas, memimpin rapat untuk selalu membuahkan hasil, dan melaksanakan tugas sebagai anggota tim pengelola tingkat kabupaten berupa menghadiri rapat tim pengelola kabupaten dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada BPK, Inspektorat dan Tim kabupaten. Bukti undangan rapat dapat dilihat pada lampiran 2. Ketiga, dilaksanakan tindakan disiplin kepada anggota yang melanggar aturan perilaku seperti terlambat mengikuti rapat walaupun hanya sebatas teguran, pelanggaran aturan perilaku ini sudah pernah terjadi karena bendahara tidak datang rapat antara kepala sekolah dan bendahara sehingga mendapat teguran. Keempat, Kepala sekolah sudah mempertanggungjawabkan dan menjelaskan apabila terjadi pengabaian terhadap kegiatan pengelolaan. Kelima, menyusun kebijakan yang etis untuk anggota misalnya semua kegiatan penggunaan dana BOS harus disusun bersama tim pengelola dana BOS pada rapat tim pengelola yang ditulis pada berita acara dan ditandatangani setiap anggota rapat.

b. Komitmen Terhadap Kompetensi.

Pertama, pada struktur organisasi disusun kegiatan dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi masing-masing anggota, seperti bendahara yang bertugas untuk mencatat belanja dana BOS. Kedua, sudah ada standar dalam penyelesaian tugas dan fungsi untuk setiap bentuk pengelolaan dana BOS, seperti

misalnya untuk bendahara haruslah paling minimal dari kalangan pegawai negeri sipil. Posisi bendahara yang ada sekarang dipegang oleh guru yang merupakan PNS dan sudah pernah menjadi bendahara di beberapa kegiatan arisan masyarakat. Ketiga, ada pelatihan dan pembinaan dari pihak pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kompetensi anggota, seperti Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah yang sudah diikuti bendahara pada awal tahun. Keempat, kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dimana kepala sekolah mampu untuk mengelola anggota sehingga dapat menyusun rencana penggunaan dana BOS hingga menyiapkan laporan pertanggungjawaban.

c. Kepemimpinan yang kondusif
Pertama, dalam pengambilan keputusan, pemimpin instansi bersama dengan anggota akan menganalisis risiko yang mungkin terjadi di dalam rapat pengelola misalnya pada saat belanja dana BOS untuk buku apabila jumlah buku yang dibeli kurang karena ada tambahan murid biasanya buku akan dibagi diantara dua murid. Kedua, dilaksanakan manajemen berbasis sekolah yang memanfaatkan partisipasi dari pihak eksternal dan internal sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Pihak-pihak eksternal yang termasuk dalam pengelolaan dana BOS adalah pihak orang tua siswa, pihak tim pengelola tingkat kabupaten, BPK, Inspektorat dan Komite sekolah, sedangkan yang termasuk pihak internal adalah pihak guru dan kepala sekolah. Ketiga,

mendukung fungsi-fungsi dalam penerapan SPIP seperti telah dilakukan kegiatan pencatatan keuangan dan tindak audit oleh pihak inspektorat dan BPK setiap tiga bulan. Keempat, aset berupa kas hanya bisa diakses oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Kelima, kepala sekolah melakukan interaksi dengan para pejabat pengelolaan dana BOS seperti di dalam rapat pengelola tingkat kabupaten. Keenam, kepala sekolah sudah memberikan respon positif terhadap pelaporan RKAS berupa ikut membantu dan memberi masukan akan komponen-komponen penggunaan dana dan menampung saran-saran dari anggota-anggota yang lainnya.

d. Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Pertama, pada struktur organisasi kepala sekolah mengatakan bahwa struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan pada tingkat ukuran sekolah yang memiliki siswa dari beberapa desa di kabupaten Samosir dan sifat sekolah yang untuk memajukan pendidikan dan struktur organisasi sudah melibatkan pihak eksternal berupa komite sekolah dan orangtua siswa untuk ikut serta dalam kegiatan pengelolaan. Kedua, pada struktur organisasi juga sudah jelas tentang wewenang dan tanggung jawab tiap anggota. Ketiga, struktur organisasi juga memiliki tingkatan jenjang dan wewenang dalam pengelolaan. Keempat, struktur organisasi juga akan selalu dinilai dan dievaluasi untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan, berdasarkan hasil observasi, pihak tim pengelola kabupaten akan datang secara berkala untuk mengevaluasi. Kelima, jumlah anggota yang disusun

dalam struktur dana BOS sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah dimana kepala sekolah yang memiliki otoritas tertinggi sebagai pemimpin.

e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang tepat

Pertama, pada pengelolaan dana BOS, wewenang akan diberikan kepada pegawai yang siap dan mampu untuk pelaksanaan tugas, seperti bendahara yang memiliki wewenang dalam pencatatan keuangan. Kedua, pegawai juga sudah mengetahui bahwa wewenang dan tanggung jawabnya dapat berpengaruh terhadap pihak-pihak dalam tim sehingga dapat lebih serius menyelesaikan tugasnya masing-masing, hal ini sudah dijelaskan secara langsung oleh kepala sekolah. Ketiga, pegawai juga sudah mengetahui pentingnya tugas dan wewenang mereka terkait dengan penerapan SPIP.

f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang

Pada nilai pertama, sudah ada syarat-syarat anggota yang diterapkan, misalnya untuk pihak komite sekolah yang dipilih misalnya harus memiliki perilaku hidup yang menjadi panutan dalam masyarakat seperti komite sekolah bapak Mangiring Nainggolan diketahui aktif dalam kegiatan masyarakat dan mengerti tentang pendidikan secara umum pada tingkat SD, pada nilai kedua latar belakang anggota sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan dibahas pada rapat tim pengelola dan pada nilai ketiga sudah dilakukan supervisi kepada pegawai secara berkala, terutama kepada bendahara yang memegang banyak wewenang keuangan.

g. Perwujudan peran pengawasan aparat intern pemerintah yang efektif.

Pada nilai pertama, sudah diberikan keyakinan yang memadai dengan adanya bentuk pengawasan intern yang efektif, seperti pengawasan dari pihak tim pengelola kabupaten dan inspektorat yang datang ke sekolah untuk memeriksa kinerja pengelolaan dana BOS apakah sudah tepat sasaran atau tidak dan pihak BPK yang meminta laporan pertanggungjawaban sekolah untuk diperiksa. Pada poin kedua sudah ada bentuk peringatan dini terkait risiko yang mungkin dalam pengelolaan seperti dari pihak pengelola kabupaten biasanya ada yang datang untuk mengawasi pengelolaan secara berkala, dan pada nilai ketiga ada kegiatan pencatatan oleh bendahara, kegiatan audit oleh inspektorat dan BPK dan pengawasan dari tim pengelola BOS kabupaten sehingga kualitas tata kelola pada pengelolaan dana BOS sudah dilaksanakan dengan baik.

h. Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.

Sekolah melaksanakan mekanisme saling uji dengan pihak pengelola kabupaten, mekanisme saling uji ini berupa penyesuaian data dari kabupaten dengan data dari pihak sekolah berupa data peserta didik. Kemudian untuk tindak audit, sekolah akan diaudit oleh inspektorat dan BPK yang dilaksanakan setiap triwulan dengan kepala sekolah menyampaikan lampiran pertanggungjawaban secara langsung.

Penilaian Risiko.

a. Identifikasi Risiko

Pada nilai pertama, metode yang dilakukan dalam identifikasi risiko adalah memperkirakan risiko yang ada dan merencanakan strategi dalam mengatasinya, dimana kegiatan ini dilakukan setiap rapat periodik tim pengelola dana BOS setiap tiga bulan. Pada kegiatan pembelian buku belajar, diidentifikasi risiko penambahan jumlah siswa sehingga buku kurang dan solusinya adalah membagi buku untuk dua siswa. Kedua, sekolah sudah menganalisis risiko internal dan eksternal pada rapat tim pengelola dana BOS, seperti pada kegiatan pembelian buku perpustakaan sudah dianalisis apabila ada risiko eksternal berupa buku mengalami kecelakaan ketika diantar dan risiko internal berupa lingkungan perpustakaan yang tidak kondusif. Ketiga, sekolah sudah menganalisis faktor risiko lain yang mungkin mempengaruhi pengelolaan dana BOS, misalnya ketika terjadi pembangunan perpustakaan dimana sistemnya kompleks antara pembelian material, pembayaran upah, dan pembayaran pajak sehingga apabila hanya bendahara yang bertugas sendiri, ada kemungkinan kesalahan sehingga anggota tim lain ikut membantu bendahara dalam kegiatan pengawasan pembangunan, pembelian material, dan pembayaran upah.

b. Analisis Risiko

Pertama, sekolah sudah memiliki tujuan umum untuk memajukan pendidikan sehingga dalam pengelolaan dana BOS sekolah melakukan kegiatan pengelolaan dana BOS yang terpusat pada peningkatan

pendidikan, misalnya pembangunan perpustakaan maupun pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi pembuatan soal. Kedua, pembentukan tujuan tingkat kegiatan sudah dilakukan sekolah setiap pelaksanaan kegiatan. misalnya ketika dilakukan pelatihan pembuatan soal ujian pada guru yang dimana sekolah membiayai ongkos guru dalam pelatihan, sehingga sekolah sudah terbatas pada tujuan kegiatan dimana kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh dinas pendidikan sedangkan sekolah hanya menyediakan biaya perjalanan, sehingga dapat dihitung secara teliti dana BOS yang harus dialokasikan.

Kegiatan Pengendalian.

a. Rivi u atas kinerja Instansi pemerintah terkait

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa kepala pengelola melakukan pengawasan dan menilai kinerja agar sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan. Tolok ukur yang digunakan pada pengelolaan dana BOS adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana setiap penyusunan laporan pertanggungjawaban, realisasi pengelolaan dana BOS akan dibandingkan dengan RKAS.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pertama, pegawai sudah mengetahui visi, misi, dan nilai atas pengelolaan dana BOS yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah pada rapat pembentukan tim pengelola dana BOS. Kedua, strategi pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan adalah dalam bentuk pelatihan contohnya dilakukannya Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis

Bendahara Dana BOS yang diikuti oleh bendahara. Ketiga, sudah ada uraian jabatan yang disusun, misalnya bendahara bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan, kepala sekolah melaksanakan kegiatan pelaporan kepada tim dana BOS Kabupaten, dan komite sekolah mengawasi penyusunan RKAS sekolah.

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Pertama, pengendalian umum atas sistem komputer terlaksana dengan bendahara yang memiliki akses atas sistem komputer sekolah. Kedua, kegiatan pengendalian aplikasi dilaksanakan oleh bendahara dalam kegiatan mengolah data-data yang dibutuhkan terkait pengelolaan dana BOS.

d. Pengendalian fisik atas aset

Pertama, sudah ada strategi pengamanan atas aset sekolah, misalnya aset yang berpotensi dicuri seperti uang diamankan dengan disimpan di bank dan aksesnya hanya dimiliki bendahara dan kepala sekolah. Kedua, sudah dilakukan bentuk kegiatan pemulihan pasca bencana yang dibahas dengan tim pengelola dana BOS, kegiatan ini sudah pernah dilakukan ketika parit sekolah pernah roboh karena hujan terus menerus, sehingga perbaikannya dilakukan dengan mengalokasikan bagian dana BOS yang mungkin untuk perbaikan.

e. Penetapan dan riviui atas indikator dan ukuran kinerja

Pertama, penetapan indikator kinerja sudah ada di juknis dana BOS berupa penyusunan RKAS sehingga ada penilaian atas kinerja tim pengelola

dana BOS. Kedua, kegiatan riviui atas indikator sudah dilaksanakan dimana setelah menyusun RKAS, sekolah akan melaporkan RKAS tersebut kepada pihak tim pengelola BOS kabupaten untuk dinilai. Ketiga, evaluasi faktor pengukuran kinerja dilakukan oleh pihak tim pengelola tingkat kabupaten dimana akan diperiksa RKAS yang disusun sekolah apakah sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Keempat, tim pengelola kabupaten akan melaksanakan pemeriksaan rutin setiap triwulan untuk menilai realisasi RKAS sekolah.

f. Pemisahan fungsi

Pada pemisahan fungsi, sekolah memiliki satu poin nilai yang harus diterapkan, yaitu untuk memisahkan tiap individu dalam melaksanakan tugas masing-masing. Pada struktur tim pengelola dana BOS sudah disusun dengan baik berupa bendahara yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, dan komite yang membantu dalam pengawasan.

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting

Pada otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, sekolah memiliki satu poin nilai yang harus diterapkan yaitu memberikan otorisasi kepada bendahara atas transaksi dan kejadian penting dalam penggunaan dana BOS. Bendahara memiliki hak untuk mengeluarkan dana sesuai dengan RKAS. Pada kejadian penting, sudah pernah terjadi parit sekolah yang rubuh sehingga dapat mengganggu masyarakat, sehingga bendahara mengeluarkan dana BOS untuk perbaikan parit tersebut.

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian penting

Pertama, bendahara akan segera melakukan kegiatan pencatatan atas kegiatan penggunaan dana BOS dan mengklasifikasikannya sesuai dengan juknis dana BOS. Bendahara selama proses pencatatan juga akan menyimpan kwitansi yang terkait dengan transaksi. Kedua, pencatatan dan klasifikasi transaksi dilakukan sepanjang siklus transaksi, misalnya mulai dari pembelian hingga pembayaran pajak.

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Pertama, sudah dilaksanakan pembatasan akses atas sumber daya pada pengelolaan dana BOS. Kegiatan pembatasan akses tersebut berupa kas yang dimiliki oleh SDN 16 Urat Timur hanya bisa diakses oleh kepala sekolah dan bendahara. Kedua, Pembatasan akses ini akan diriviu dimana setiap kegiatan pengambilan dana akan ada surat penugasan yang dikeluarkan sehingga bisa diperiksa oleh pihak tim pengelola dana BOS kabupaten, BPK, dan inspektora.

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pertama, sekolah menugaskan seseorang bertanggung jawab atas penyimpanan aset dan pencatatannya, dimana bendahara bertanggung jawab atas fungsi tersebut. Kedua, kegiatan penyimpanan dan pencatatan tersebut diawasi oleh kepala sekolah dan setiap pemeriksaan akan dibuat berita acara pemeriksaan kas yang ditandatangani kepala sekolah.

k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting

Pada Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting, sekolah memiliki satu poin nilai yang harus diterapkan yaitu melakukan dokumentasi atas seluruh transaksi dan kejadian penting. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sekolah dengan melampirkan dokumentasi berupa surat undangan rapat, kwitansi, surat pembayaran pajak pada laporan pertanggungjawaban.

Informasi dan Komunikasi

Unsur informasi dan komunikasi merupakan unsur penting untuk pengumpulan dan penyebaran informasi dalam pengelolaan dana BOS. Dalam pelaksanaannya, untuk memenuhi unsur informasi dan komunikasi ini, ada dua faktor yang harus dipenuhi, yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa sekolah sudah menyediakan sarana komunikasi untuk digunakan pihak pengelola dana BOS berupa telepon, email maupun surat, dan juga sudah tersedia sistem informasi berupa situs bos.kemendikbud.go.id, aplikasi ARKS dan aplikasi DAPODIK yang dapat dimanfaatkan pihak pengelola untuk mempermudah pencapaian dari tujuan instansi.

Pemantauan

Pada pengelolaan dana BOS SD Negeri 16 Urat Timur, ditemukan bahwa sistem pemantauan sudah terlaksana dengan baik. Adanya pengawasan dari tim pengelola dana BOS kabupaten serta pengawasan dan audit dari pihak inspektorat dan BPK. Ketika ada saran-saran yang diberikan oleh pihak pengawas, maka pihak sekolah akan langsung menindaklanjuti temuan tersebut yang dibahas melalui rapat tim pengelola dana BOS untuk mengambil keputusan yang tepat. Pada kegiatan pengelolaan dana BOS sekolah ini dikatakan bahwa belum ada hasil audit terkait kegiatan pengelolaan, tetapi dalam hal pelaporan, pihak pengawas menyarankan untuk menyesuaikan data pembelian dengan pencatatannya karena pernah terjadi perbedaan jenis produk yang dibeli dengan yang dilaporkan.

Penggunaan Dana BOS dalam Kegiatan Operasional SD Negeri 16 Urat Timur.

Dana BOS yang digunakan sudah sesuai dengan standar penggunaan dana BOS pada juknis dana BOS. Pada pengelolaan dana BOS SD Negeri 16 Urat Timur, ditemukan bahwa sekolah sudah menggunakan dana BOS sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS pada bagian buku pembantu rincian objek belanja, yang seluruh transaksi pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 16 Urat Timur tidak ada penggunaan dana

BOS diluar ketentuan penggunaan dana BOS menurut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020.

Penggunaan dana BOS memang sudah sesuai dengan ketentuan juknis dana BOS. Namun, berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa pada lingkungan belajar sekolah ada sarana dan prasarana pembelajaran yang sudah rusak tetapi belum diperbaiki. Dana bos dapat dialokasikan terhadap sarana dan prasarana, sehingga sekolah seharusnya dapat memaksimalkan sarana dan prasarana sekolah untuk kenyamanan siswa. Dari hasil observasi ditemukan juga perpustakaan sekolah masih banyak bagian kosong, sehingga membatasi cakupan siswa dalam membaca.

Pada pengelolaan dana BOS, dilaksanakan manajemen berbasis sekolah yang menekankan keikutsertaan pihak-pihak eksternal dan internal untuk menentukan bersama alokasi pengelolaan dana BOS. Dengan sekolah dapat menentukan sendiri alokasi dana BOS, sekolah dapat memprioritaskan kegiatan yang penting terlebih dahulu. Dengan melihat sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai, sekolah dapat memprioritaskan alokasi dana BOS untuk meningkatkan sarana dan prasarana sehingga meningkatkan kenyamanan siswa dalam menempuh pendidikan. Hal lainnya adalah bahwa ditemukan dari laporan pertanggungjawaban pada dokumen pernyataan tanggung jawab, ada sisa dari uang dana BOS yang belum digunakan. Keadaan ini tentunya

harus mendapat perhatian penuh dari tim pengelola untuk dapat memaksimalkan pengeluaran untuk tujuan peningkatkan mutu pendidikan.

PENUTUP.

Kesimpulan.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pada pengelolaan dana BOS SD Negeri 16 Urat Timur kelima unsur pengendalian internal pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan telah terlaksana dengan baik. Dengan terlaksananya program SPIP yang baik pada pengelolaan dana BOS SD Negeri 16 Urat Timur ditemukan bahwa penggunaan dana BOS SD Negeri 16 Urat Timur sudah sesuai dengan sasaran pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Tetapi, untuk pengalokasian dana BOS, masih belum sepenuhnya dimaksimalkan oleh sekolah dengan ditemukannya masih ada sektor yang masih bisa dimaksimalkan sekolah untuk memanfaatkan sisa dana BOS.

Keterbatasan Penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pengolahan data, tentunya ada keterbatasan-keterbatasan yang muncul. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara hanya pada pihak sekolah dan hasil wawancara ini sebagian besar dikonfirmasi dengan dokumen-dokumen yang bisa diakses oleh peneliti dan hasil wawancara dengan narasumber lainnya. Tetapi tidak semua wawancara diverifikasi menggunakan dokumen sehingga

kemungkinan untuk jawaban wawancara berisi opini pribadi narasumber masih mungkin muncul. Contohnya adalah pada bagian surat pernyataan integritas yang ada pada pihak tim pengelola kabupaten, sedangkan peneliti hanya melakukan tindakan penelitian di sekolah. Hal lainnya adalah bahwa penelitian dilaksanakan pada tahun *pandemic Covid 19*, sehingga dilaksanakan kegiatan belajar-mengajar daring yang mengakibatkan penggunaan dana BOS terbatas sehingga sumber data peneliti menjadi lebih terbatas.

Saran.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya dan untuk SD Negeri 16 Urat Timur antara lain: (1) Untuk memaksimalkan data penelitian, peneliti dapat mengumpulkan data dari tahun sebelumnya agar variasi penggunaan dana BOS lebih banyak; (2) SD Negeri 16 Urat Timur dapat lebih memperhatikan mengenai alokasi dana BOS terhadap semua semua bidang, dengan memprioritaskan hal-hal yang dapat meningkatkan kompetensi siswa; (3) Untuk SD Negeri 16 Urat Timur untuk dapat secara maksimal memanfaatkan dana BOS sehingga dana BOS tidak bersisa pada perhitungan akhir tahun. SD Negeri 16 Urat Timur dapat meningkatkan kapasitas buku di perpustakaan maupun menambah perangkat belajar mengajar.

Daftar Pustaka

- Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway Commission. (2013). *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*. COSO.
- Creswell, Jhon W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: ANDI
- Hadari, Nawawi. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Husein, M Fahri, Wibowo A. (2002). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: AMP JKPM.
- Kriyantono, Rahmat. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : PT. Kencana Perdana
- Mardi. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Nabila, Faradina. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Kartini. (Skripsi Mahasiswa, UPN Veteran Jakarta). Diakses dari <http://repository.upnvj.ac.id/2110/>
- Pebriyani. (2014). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD NEGERI DI TANJUNGPINANG TIMUR. (Sripsi Mahasiswa, Universitas Maritim Raja Ali Haji). Diakses dari http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/Jurnal.pdf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/permendikbud-nomor-8-tahun-2020-tentang-petunjuk-teknis-bos-reguler>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49369/pp-no-19-tahun-2005>
- K. Yin, Robert. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta